BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Posisi Kasus

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 22.00 WIB saat terdakwa Latif Saepuloh Bin Nein Menunggu saksi Irpan Supriatna Bin Winata dilapangan basket di Dusun Bojong Tugu Rt.021/004 Desa Rengasdengklok selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Dan terdakwa bertemu dengan saksi Eman Sulaiman Bin Encing lalu terdakwa bertanya keberadaan saksi Irpan kepada saksi Eman sambil terdakwa membawa sebilah golok yang disimpan oleh terdakwa didalam baju yang dikenakan oleh terdakwa karena golok tersebut mengambil dari gerobak tukang kelapa disekitar kejadian namun tidak lama kemudian, terdakwa melihat saksi Irpan yang turun dari sepeda motornya kemudian, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Irpan tanpa berkata-kata apapun terdakwa mengarahkan sebilah golok kearah saksi Irpan sebanyak lima kali hingga mengenai sebagian pelipis sebelah kiri dan tangan kiri saksi Irpan. Kemudian terdakwa mengarahkan kembali golok yang masih dipegang ditangan tangan kanan terdakwa sebanyak tiga kali kearah badan dari saksi Irpan dan ada warga yang berusaha melerai perbuatan terdakwa tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri sambil membawa golok ditangannya dan terdakwa langsung membuang golok disemak-semak halaman lapangan bojong tugu.

Atas keterangan terdakwa, bahwa terdakwa membawa golok sepanjang Tiga Puluh Centimeter bergagang kayu milik terdakwa dari rumah terdakwa dengan maksud

dan tujuan melukai saksi Irpan. Serta terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa marah karena saksi Irpan membentak bibi terdakwa. Menurut keterangan korban sekaligus saksi bahwa korban tidak sempat melakukan perlawanan karena kajadian tersebut sangat cepat namun korban sempat menyelamatkan diri dengan berlari menjauhi saksi.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban terdakwa tidak membantu biaya pengobatan medis korban sementara itu korban harus dirawat di Rumah Sakit selama dua bulan lamanya dan korban pun harus beristirahat dari pekerjaannya.

Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni dengan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan Hakim yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka berat serta terdakwa pernah dihukum sebelumnya. Sementara itu pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa ialah terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya. Atas perbuatan tersebut terdakwa Latif Saepulloh Bin Nein dipidana penjara selama lima tahun.

B. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia perkembangan sistem peradilan pidana saat ini tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada kepentingan saksi dan

korban. Oleh karena itu kelembagaan Perlindungan Saksi dan Korban harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana oleh karena itu terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum dimasyarakat.

Selain saksi dan korban ada pihak lain yang memiliki kontribusi besar untuk mengungkapkan tindak pidana tertentu yakni saksi pelaku *justice collaborator* pelapor *whistle blower* dan ahli termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan.¹

Dari perkembangannya tampak beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya mengenai²

1. Kelemahan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

² *ibid*

2. Keterbatasan kewenangan yang menyakut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan ahli
3. Koordinasi antar lembaga dalam pemberian kompensasi dan restitusi
4. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK adalah lembaga yang mandiri. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yakni ada di Ibu kota Negara yakni di Jakarta. Namun Lembaga Perlindungan saksi dan Korban mempunyai perwakilan didaerah sesuai dengan keperluannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³

1. LPSK merupakan lembaga yang mandiri
2. LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
3. LPSK mempunyai perwakilan didaerah sesuai dengan keperluan
4. Ketentuan mengenai pembentukan susunan dan tata kerja perwakilan LPSK didaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Presiden.

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban oleh pemerintah menunjukkan respons positif dari negara dalam melihat penegakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini dengan lebih spesifik mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban yang sebelumnya terbagi-bagi menjadi beberapa peraturan. Komisioner perlindungan saksi dan korban menyatakan

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 11

lembaga nya masih kesulitan memberikan perlindungan terhadap korban karena ke terbatasan ketentuan hukum.⁴

Dalam proses persidangan saksi dan korban menempati posisi penting namun disisi lain kedatangan saksi dan korban dalam proses peradilan kurang menarik masyarakat dan penegak hukum banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan dikarenakan saksi dan korban takut memberikan kesaksian dihadapan penegak hukum karena mendapatkan ancaman dari pihak tertentu.

Tugas utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah menerima permohonan dan memberikan perlindungan bagi saksi ataupun korban. Lembaga ini juga harus melakukan tugas administrative terkait perlindungan saksi dan korban. Sebelum saksi dan korban agar bisa memperoleh perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, semua dari mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Lembaga ini disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban dan telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan Lembaga Saksi dan Korban terhadap Saksi dan atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut.⁵

⁴ Nadia Ayu Apriani, Margo Hadi Pura, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang 2020, Hlm. 221

⁵ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Sifat pentingnya keterangan saksi atau korban
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi atau korban
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi atau korban
4. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi atau korban.

Dalam rangka peningkatas kapasitas kelembagaan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat ini sedang berupaya menyusun suatu peraturan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang diharapkan mampu menciptakan tata kerja dan peningkatan kinerja lembaga. Apabila perlindungan saksi dan korban didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi tinggi serta tertata baik tentunya tugas dan fungsi serta peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga berkerja keras untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, oleh karena itu dibentuklah unit penerimaan permohonan pada lembaga perlindungan saksi dan korban. Pendirian unit penerimaan permohonan dilakukan karena besarnya permohonan publik dan menuntut perlindungan sebagai saksi khususnya saksi tindak pidana penganiayaan. Oleh sebab itu lembaga ini sangat penting untuk melindungi korban serta saksi ketika ditemukanya tindak pidana.⁶

⁶ Nadia Ayu Apriani, Margo Hadi Pura, *Op.Cit.* Hlm. 233